**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH DI PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS LAMPUNG**

(Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah

 Metode Penelitian Administrasi Publik)

Oleh :

JAZLYN INEZA

2416041078



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

 **2025**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Di Indonesia, isu kemiskinan hingga saat ini masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Berdasarkan laporan BPS, tercatat sekitar 8,47% atau setara 23,85 juta penduduk masih berada dalam kondisi miskin (statistik, 2025). Kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan cenderung menurun, jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup besar. Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini, tetapi hasilnya belum sepenuhnya memberikan perubahan yang berarti. Salah satu penyebab utama dari tingginya angka kemiskinan di Indonesia adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan yang merata. (Sucita, 2021).

Pendidikan tinggi sering dipandang sebagai salah satu jalan utama untuk mendorong mobilitas sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah terus berupaya memastikan seluruh peserta didik dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah diberikan mandat untuk menjamin keadilan, pemerataan, serta keterjangkauan akses pendidikan tinggi yang berkualitas demi mendorong kemajuan sosial, kesejahteraan, dan kemandirian bangsa. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka kesempatan belajar di perguruan tinggi, sekaligus membina generasi muda agar tumbuh menjadi individu yang cerdas, berdaya saing, dan unggul sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah pemberian dukungan berupa program beasiswa. (Lomban et al., 2023)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan global yang diadopsi oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan, pengurangan kemiskinan, serta penanggulangan kesenjangan (Lomban et al., 2023). Di mana salah satu sasaran utama SDGs adalah memastikan tersedianya pendidikan yang merata, inklusif, dan adil sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan belajar yang setara. Target ini dirancang untuk dicapai pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen kuat dalam rangka mendukung serta memperluas akses pendidikan di seluruh wilayah, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kebijakan merupakan sebuah konsep yang lahir dari proses pertimbangan atau musyawarah mendalam mengenai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok ahli. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku seseorang maupun lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Tilaar, 2008). Oleh sebab itu, kebijakan bersifat disengaja karena memuat maksud, arah, dan tujuan yang jelas. Tidak hanya sebatas dalam mengatur perilaku, kebijakan juga mencakup tahapan perumusan, implementasi, hingga evaluasi dari suatu tindakan. Menurut (Dewi, 2019), kebijakan pada hakikatnya adalah instrumen penting yang berperan sebagai pedoman dalam menentukan arah pembangunan, mengelola sumber daya, serta memastikan setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

Pendidikan merupakan rangkaian upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa yang nyata melalui pembentukan ketahanan nasional demi tercapainya cita-cita bangsa. Pendidikan yang berkualitas mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk terus meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia secara resmi telah berusaha mewujudkan pemerataan pendidikan, dimulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, yang kemudian diperkuat melalui program wajib belajar sembilan tahun. Upaya ini lebih berfokus pada perluasan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Pemerataan tersebut dilakukan agar setiap lapisan masyarakat, tanpa membedakan usia, waktu, maupun lokasi tempat tinggal, baik di kota maupun di desa dapat menikmati hak yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Menurut Rohman 2009, dalam (Rohaeni & Saryono, 2018), UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hal ini menimbulkan isu pemerataan pendidikan yang perlu menjadi perhatian. Pemerintah berkewajiban memastikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan yang layak bukan hanya hak kelompok masyarakat menengah ke atas, tetapi juga hak masyarakat miskin. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa layanan pendidikan cenderung lebih baik diberikan kepada golongan menengah ke atas dibandingkan kepada masyarakat kurang mampu. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya responsif dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Kehadiran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan mampu membuka kesempatan yang sama bagi semua anak untuk memperoleh pendidikan.

Kemiskinan menjadi penghambat bagi masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan, sehingga berdampak pada terhambatnya kemajuan di bidang pendidikan. Pendidikan dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat, terutama bila dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Nadia Nadia et al., 2024). Kondisi kemiskinan membuat banyak orang tidak mampu menikmati layanan pendidikan, padahal pendidikan sendiri bertujuan membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama tidak meratanya akses pendidikan dan merupakan masalah mendasar dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan instrumen Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini memberikan kontribusi besar dalam membantu siswa kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak, menekan angka putus sekolah, serta mendukung pemenuhan kebutuhan belajar. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh peserta didik untuk menunjang biaya transportasi, perlengkapan sekolah, hingga uang saku harian. Siswa dari keluarga kurang mampu yang masih menempuh pendidikan dapat memperoleh bantuan melalui program pemerintah bernama Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini pertama kali diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, sebagai upaya memberikan dukungan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan. Melalui PIP, para pelajar yang terdaftar sebagai penerima bantuan dijamin mendapatkan dukungan finansial untuk menunjang kebutuhan pendidikannya (Lomban et al., 2023).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan tunai pendidikan yang ditujukan bagi anak usia sekolah 6–21 tahun, khususnya penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau berasal dari keluarga miskin dan rentan, termasuk rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera. Sejak diluncurkan pada akhir 2014, PIP melalui KIP menjadi bentuk bantuan yang lebih terarah bagi peserta didik kurang mampu. Tujuan utama program ini adalah mencegah siswa putus sekolah akibat keterbatasan biaya, sekaligus mendorong anak yang sudah berhenti bersekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan. Dengan adanya dana BOS untuk kebutuhan sekolah serta KIP untuk menunjang kebutuhan pribadi siswa, faktor ekonomi seharusnya tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka untuk bersekolah maupun melanjutkan pendidikan (Rohaeni & Saryono, 2018).

Program Indonesia Pintar merupakan kerja sama yang melibatkan tiga kementrian yaitu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbut), Kementrian Sosial (Kemensos), dan Kementrian Agama (Kemenang) (Rohaeni & Saryono, 2018). Melalui program ini, diharapkan peserta didik dari keluarga kurang mampu dapat terbantu dalam memenuhi keperluan belajar untuk menunjang kelancaran pendidikannya. PIP yang dijalankan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pembiayaan pendidikan, dengan memprioritaskan siswa dari keluarga miskin agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan hingga lulus sekolah menengah, baik di jalur formal maupun nonformal ( Zamjani, 2009 ; Amroni et al., 2023). Kebijakan ini diupayakan pemerintah sebagai langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, khususnya dalam sektor pendidikan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih muncul persoalan terkait pemerataan pendidikan dan ketepatan sasaran program. Hal ini terlihat dari adanya siswa dari keluarga mampu yang justru tercatat sebagai penerima bantuan, sementara sebagian siswa dari keluarga tidak mampu belum terakomodasi sebagai penerima KIP.

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun dengan matang. Proses ini baru bisa dijalankan ketika perencanaan dianggap tuntas. Implementasi sendiri merupakan tahap pelaksanaan yang berlaku di berbagai bidang tanpa adanya batasan tertentu. Karena itu, setiap kebutuhan di lapangan harus dipersiapkan secara optimal sebelum sebuah program dijalankan. Sering kali, implementasi hanya dipandang sebatas kegiatan menjalankan program yang sudah dirumuskan oleh pengambil keputusan, sehingga seolah tidak memiliki peran yang signifikan

Menurut (Nadia Nadia et al., 2024), implementasi merupakan rangkaian langkah administratif yang bisa dipelajari dalam konteks program tertentu. Jika tujuan serta target program sudah jelas, kegiatan sudah dirancang, dan anggaran telah tersedia serta dialokasikan, maka tahap implementasi dapat dilakukan. Salah satu bentuk nyata implementasi tersebut adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Hasil penelitian (Anugrah, 2018 ; Nadia Nadia et al., 2024)), menunjukkan bahwa dana PIP yang disalurkan belum sepenuhnya digunakan sesuai dengan petunjuk teknis, sehingga permasalahan biaya pendidikan peserta didik belum terselesaikan. Senada dengan itu, menemukan adanya penyalahgunaan Program Indonesia Pintar di Kota Kupang dan Kota Palembang, di mana pelaksanaannya kurang optimal akibat campur tangan elit politik lokal yang memasukkan nama-nama siswa tertentu sebagai penerima bantuan. Ironisnya, jumlah siswa putus sekolah terus meningkat setiap tahun, sementara alokasi dana PIP justru mengalami penurunan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menekan angka putus sekolah belum berjalan efektif, karena fakta di lapangan masih menunjukkan tingkat putus sekolah masih tinggi. Dengan demikian, tujuan program wajib belajar belum sepenuhnya tercapai, mengingat masih ada warga negara yang belum memperoleh akses pendidikan, salah satunya disebabkan oleh faktor kemiskinan.

Peningkatan jumlah siswa putus sekolah setiap tahun yang berbanding terbalik dengan penurunan alokasi dana PIP menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menekan angka putus sekolah belum berjalan efektif, karena jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan masih tinggi. Hal ini membuat efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bentuk bantuan pemerintah menjadi sorotan para akademisi untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dengan distribusi dan pemanfaatan dana yang dialokasikan.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pemberian akses yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi. Meski demikian, pengalaman dari pelaksanaan program Bidikmisi sebelumnya menunjukkan adanya permasalahan dalam ketepatan sasaran penerima beasiswa. Penelitian Muharani Lestari dkk. 2019, dalam (Rohmah & Kasmawanto, 2022), menemukan bahwa di Universitas Riau terdapat mahasiswa yang memperoleh beasiswa meskipun berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas, sehingga sebenarnya tidak memenuhi kriteria penerima.

Sebelum hadirnya Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), pemerintah melalui Kemenristekdikti telah lebih dulu melaksanakan Program Beasiswa Bidikmisi. Sejak 2010, Bidikmisi menjadi bantuan pendidikan bagi lulusan SMA maupun SMK yang memiliki keterbatasan ekonomi agar bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Memasuki tahun 2020, skema pendanaan pendidikan ini mengalami perubahan, di mana pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar kuliah pada tahun ajaran 2020/2021. Program tersebut berawal dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sebelumnya diperuntukkan bagi siswa SD, SMP, hingga SMA saat ini berlanjut sampai ke Perguruan Tinggi. (Rohaeni & Saryono, 2018).

Berbeda dengan pelaksanaan Program Beasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dkk.2019, dalam (Rohmah & Kasmawanto, 2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Beasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah berjalan sesuai dengan ketentuan dari Kemenristekdikti, dan implementasinya juga mengikuti arahan dari Ditjen Belmawa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam proses pengelolaan. Hambatan tersebut di antaranya adalah kurangnya koordinasi antara pihak pengelola dengan pihak-pihak terkait, serta kurangnya informasi dan komunikasi yang diberikan kepada penerima Beasiswa Bidikmisi. Faktor-faktor ini menjadi penghalang utama dalam proses implementasi program di Universitas tersebut. (Rohmah & Kasmawanto, 2022)

Di Universitas Lampung, kebutuhan riset ini muncul dari pentingnya menelaah secara menyeluruh bagaimana implementasi KIP Kuliah berlangsung dari tingkat universitas hingga fakultas. Pendekatan ini dirasa penting karena kebanyakan studi sebelumnya hanya memotret satu fakultas atau aspek tertentu, padahal dinamika di kampus besar sangat beragam baik dalam praktik antarunit, koordinasi, maupun pengalaman mahasiswa. Dengan menggunakan perspektif kebijakan publik, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana standar dan prosedur kampus dijalankan, bagaimana data diverifikasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana pelayanan dan koordinasi memengaruhi efektivitas program.

Dari sisi metodologi, pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap kompleksitas implementasi kebijakan ini. Wawancara mendalam dengan pengelola beasiswa hingga mahasiswa penerima KIP Kuliah akan dipadukan dengan observasi langsung dan telaah dokumen. Strategi ini memungkinkan peneliti memahami proses secara utuh, bukan hanya menilai hasil akhir semata (Rohmah & Kasmawanto, 2022).

**1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi KIP Kuliah dilaksanakan di Universitas Lampung pada tahap seleksi, penetapan, penyaluran, serta monitoring dan evaluasi?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat terhadap implementasi di tingkat Universitas Lampung?

**1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Indonesia Pintar di Universitas Lampung, mengungkapkan apa saja faktor yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Indonesia Pintar di Universitas Lampung, serta Merumuskan rekomendasi perbaikan implementasi berdasarkan temuan lapangan.

**1.4 MANFAAT PENELITIAN**

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian implementasi kebijakan pada sektor pendidikan tinggi, khususnya dalam penerapan model implementasi pada program bantuan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi negeri.

1. Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan di daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendidikan, agar dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Indonesia Pintar. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi unit pengelola beasiswa perguruan tinggi terhadap penerima program agar lebih efektif dan tepat sasaran dalam pengelolaan bantuan pendidikan.

1. Kebijakan
Hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi teknis bagi pimpinan universitas dan pemangku kebijakan terkait untuk meningkatkan ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, kemudahan proses, serta pengawasan akademik agar pengelolaan KIP Kuliah lebih efektif dan berkelanjutan.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 PENELITIAN TERDAHULU**

Riset terdahulu memiliki peran penting sehingga dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam merancang tahapan penelitian secara terstruktur. Ada beberapa riset dan penelitian yang telah dilakukan yang dapat peneliti temukan dan relevan terkait Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam hal ini peneliti menemukan dua skripsi dan satu jurnal nasional tentang penerapan dari program tersebut. Penyajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengkayaan konsep terkait Implementasi atau keefektifan Program Indonesia Pintar (PIP).

Tabel 1. Sumber Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N O** | **Penelitian** | **Judul** | **Hasil Penelitian** | **Persamaan Penelitian** | **Perbedaan Penelitian** |
| 1. | Masyitah (2023) -Skripsi | *Efektivitas penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP)**Kuliah di Universita s Islam Negeri Datokaram a Palu* | Proses penyaluran dinilai cukup berjalan, namun ditemukan hambatan pada puncak layanan: sosialisasi belum seragam, sirkulasi/remedi asi berkas berulang, keterbatasan verifikator, dan koordinasi lintas unit yang belum optimal. Rekomendasi: standardisasi SOP danpenguatan helpdesk/FAQ serta penambahan buffer SDM saat awal semester. | Sama‐sama menelaah implementasi/efekti vitas program bantuan pendidikan pemerintah dan menyoroti variabel proses (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur). | Lokasi PTAIN (UIN Datokarama Palu). Fokus pada efektivitas penyaluran dan pengalaman penerima di satu kampus; penelitian ini berfokus pada PTN Universitas Lampung dan menautkan proses ke indikator hasil (ketepatan sasaran/waktu, kemudahan, retensi, kepuasan). |
| 2. | Seniati (2021) -Skripsi | *Pelaksana an Program**Kartu* | Pelaksanaan KIP/PIP di jenjangmenengah | Sama‐sama membahas implementasiprogram KIP/PIP | Konteks pendidikan menengah (hulu).Tidak membahas |
|  |  | *Indonesia Pintar di SMA**Negeri 1 Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan* | dipengaruhi validitas data sosial‐ekonomi dan mutu sosialisasi sekolah-orang tua-siswa.Kekurangan pada dua aspek ini memunculkan salah sasaran/berkas tidak valid yang berimbas pada tahap lanjut. | dan menekankan pentingnya komunikasi serta verifikasi data untuk ketepatan sasaran. | penyaluran/monito ring di kampus. Dalam studi ini, temuan “hulu”dipakai sebagai basis merancang verifikasi silang dan klarifikasi substantif di Universitas Lampung. |
| 3. | Rohmah & Kasmawan to (2022) -Jurnal | *Implement asi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta* | Ditemukan masalah ketidakkonsiste nan informasi lintas unit, sirkulasi dokumen berulang, dan keterlambatan penyaluran.Kebijakan perbaikan: SOP rinci, kanal helpdesk terdokumentasi, serta koordinasi antarlembaga untuk mempercepat alur danmeningkatkan | Sama‐sama meneliti implementasi KIP Kuliah di tingkat perguruan tinggi dan menyoroti pentingnya tata kelola proses serta pengalaman layanan penerima. | Konteks PTS dengan konfigurasi kelembagaan berbeda. Penelitian ini akan menguji ulang temuan tersebut pada PTN Universitas Lampung, memeriksa variasi antar‐fakultas dan keterkaitan proses– outcome (ketepatan sasaran/waktu, kemudahan, retensi, kepuasan). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pengalaman penerima. |  |  |

**2.2 DASAR TEORI**

**2.2.1 KEBIJAKAN PUBLIK**

Dalam kajian administrasi dan kebijakan, kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian keputusan penting yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan masalah bersama. Proses ini mencakup pemilihan instrumen, pengaturan perilaku, dan pengalokasian sumber daya secara sistematis (Dewi, 2022). Definisi ini menekankan dua hal utama: pertama, kebijakan publik bukan sekadar dokumen formal, tapi harus bisa diterapkan secara nyata; kedua, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada keselarasan antara tujuan, alat yang digunakan, dan institusi yang menjalankannya (Martin, n.d.).

Dalam konteks pendidikan tinggi, kebijakan publik berfungsi sebagai intervensi untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, dan menjamin keberlanjutan studi bagi kelompok rentan. Kebijakan semacam ini baru akan bermakna jika mampu membawa perubahan nyata dalam pengalaman mahasiswa baik melalui struktur kelembagaan yang jelas maupun proses layanan yang dapat diprediksi (Zulaecha & Ngiu, 2019).

Secara umum, tujuan kebijakan publik dapat dikelompokkan ke dalam tiga ranah: menyelesaikan persoalan utama, mendorong keadilan dan kesejahteraan melalui distribusi ulang sumber daya, serta menjaga keteraturan agar lembaga publik bisa beradaptasi dengan perubahan (Implementasi Kebijakan Publik, 2024). Dalam pendidikan tinggi, hal ini terwujud dalam bentuk penghapusan hambatan ekonomi, pengurangan ketimpangan akses, dan penciptaan lingkungan akademik yang mendukung keberhasilan studi (Manajemen Daya Saing Perguruan Tinggi, 2020). Pendekatan manajemen mutu menambahkan bahwa tujuan kebijakan perlu dikaitkan dengan indikator proses dan hasil yang bisa diukur agar pelaksanaan bisa dievaluasi dan terus diperbaiki (Asy’ari, 2020).

Untuk memahami bagaimana sebuah kebijakan bergerak dari niat ke dampak nyata, konsep siklus kebijakan menjadi peta yang berguna. Meski kenyataan di lapangan seringkali tidak linear, umumnya siklus ini mencakup tahapan mulai dari penyusunan agenda, perumusan opsi, pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pemberian umpan balik (Dewi, 2022). Masing-masing tahapan ini punya fungsi penting dalam memastikan bahwa proses kebijakan berjalan efektif dan berkelanjutan (Martin, n.d.). Evaluasi, misalnya, seharusnya tidak hanya menjadi laporan akhir, melainkan bagian dari mekanisme pembelajaran untuk memperbaiki pelaksanaan ke depan (Williams et al., 2021).

Tahapan implementasi memiliki posisi sentral dalam siklus ini karena menjadi jembatan antara rancangan dan dampak kebijakan. Implementasi berarti menerjemahkan tujuan menjadi tindakan yang bisa dijalankan, mengoordinasikan aktor, serta memobilisasi sumber daya agar kebijakan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan (Dewi, 2022). Banyak kegagalan justru muncul bukan dari isi kebijakan, tetapi dari pelaksanaannya mulai dari pesan yang tidak jelas, birokrasi yang berbelit, hingga kapasitas pelaksana yang belum memadai (Larasati et al., 2022). Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan memerlukan prosedur operasional yang jelas, pembagian kewenangan yang tegas, serta mekanisme umpan balik yang responsif (Williams et al., 2021).

Dalam kerangka grand theory, para pelaku kebijakan terbagi atas aktor negara dan non-negara, masing-masing berperan di tahap implementasi. Aktor negara mencakup regulator pusat dan daerah, serta birokrasi kampus. Sementara itu, aktor non-negara meliputi mahasiswa sebagai penerima manfaat, keluarga, organisasi kemahasiswaan, media, masyarakat sipil, hingga mitra penyalur dana (Implementasi Kebijakan Publik, 2024). Di level pelaksana langsung, seperti operator dan petugas layanan, kualitas layanan yang mereka berikan akan sangat memengaruhi kelancaran proses serta persepsi mahasiswa terhadap keadilan dan transparansi (Rohmah & Kasmawanto, 2022). Peran pimpinan unit pun krusial dalam membagi tugas dan menjaga ritme kerja agar beban tidak menumpuk saat periode sibuk (Zulaecha & Ngiu, 2019).

Lingkungan kampus negeri memiliki karakteristik institusional tersendiri yang memengaruhi proses implementasi. Pertama, struktur organisasi yang bertingkat dari rektorat hingga program studi menuntut koordinasi yang rapi agar keputusan pusat bisa diterjemahkan dengan konsisten sampai ke unit layanan terdekat mahasiswa (Manajemen Daya Saing Perguruan Tinggi, 2020). Kedua, tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan kepatuhan administratif tinggi, yang bisa memperlambat proses bila SOP terlalu kaku (Asy’ari, 2020). Ketiga, siklus akademik menciptakan lonjakan beban layanan yang harus diantisipasi dengan penguatan SDM, penyesuaian alur, dan sistem pelacakan berbasis teknologi (Larasati et al., 2022). Keempat, keterlibatan pihak eksternal seperti kementerian atau lembaga penyalur dana menambah lapisan koordinasi yang harus dijaga agar tidak terjadi keterlambatan pencairan (Sariri & Prabawati, 2024).

Instrumen kebijakan menjadi bagian penting dari grand theory karena menjadi “alat” negara dalam mewujudkan tujuan. Instrumen ini bisa berupa regulasi (seperti kriteria penerima), mekanisme ekonomi (seperti sistem pencairan), atau informasi (seperti pedoman atau portal resmi). Ketika semua instrumen ini selaras, proses akan lebih efisien dan jelas; namun jika tidak, justru bisa menimbulkan duplikasi dan memperlambat layanan (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, 2023; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Grand theory juga memandang evaluasi sebagai bagian yang menyatu dengan kebijakan, bukan sekadar penutup formal. Evaluasi yang baik menggabungkan indikator proses (seperti kejelasan informasi atau efektivitas sistem) dengan indikator yang dirasakan langsung oleh penerima manfaat (seperti ketepatan waktu atau kepuasan mahasiswa) (Sariri & Prabawati, 2024). Pendekatan delivery management yang berbasis data real-time dan tinjauan rutin menjadi penting untuk menjaga pelaksanaan tetap responsif dan adaptif (Williams et al., 2021).

Meskipun bersifat umum, grand theory tetap sangat relevan bagi program bantuan pendidikan. Pertama, prinsip keadilan akses menuntut proses seleksi yang adil dan berbasis bukti, agar penerima tepat sasaran (Sucita, 2021). Kedua, keberlanjutan studi mengharuskan pencairan dana selaras dengan kalender akademik, yang hanya mungkin dicapai dengan koordinasi antarlembaga yang kuat (Saprianto, 2023). Dengan demikian, grand theory memberi kerangka kerja untuk menghubungkan tujuan, alat, lembaga, dan pelaku dalam konteks kampus yang kompleks (Implementasi Kebijakan Publik, 2024).

Sebagai penutup bagian ini, grand theory kebijakan publik memberi tiga arahan utama untuk penelitian implementasi di kampus negeri besar seperti Universitas Lampung. Pertama, rumuskan tujuan dan instrumen kebijakan secara operasional agar bisa diturunkan ke prosedur kerja dan indikator kinerja yang jelas (Asy’ari, 2020). Kedua, petakan pelaku dan kewenangan di tiap level agar tidak tumpang tindih dan mempercepat pengambilan keputusan (Zulaecha & Ngiu, 2019). Ketiga, rancang sistem evaluasi–umpan balik yang menggabungkan data proses dan pengalaman mahasiswa agar perbaikan bisa dilakukan secara cepat dan berdampak langsung (Williams et al., 2021). Dengan dasar ini, pembahasan berikut akan mengeksplorasi teori implementasi menengah sebagai lensa proses serta teori terapan untuk melihat dinamika program bantuan pendidikan di kampus negeri (Larasati et al., 2022).

**2.2.2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

Middle theory tentang implementasi kebijakan membantu kita memahami bagaimana kebijakan yang dirancang di atas kertas bisa dijalankan secara nyata di lapangan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, aturan, sumber daya, serta kondisi organisasi yang khas (Dewi, 2022). Dalam konteks ini, model-model implementasi berperan sebagai alat bantu untuk menganalisis dan mendiagnosis hubungan antara komunikasi kebijakan, kapasitas pelaksana, perilaku birokrat lapangan, desain organisasi, dan lingkungan pelaksana (Martin, n.d.).

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan yang dirancang untuk memiliki efek nyata dan mencapai tujuan. Kebijakan yang dibuat tidak harus berbentuk resmi seperti undang-undang, tetapi juga harus diterapkan dengan benar. Implementasi, menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Pramono, 2020), adalah proses melihat secara langsung apa yang terjadi setelah program dijalankan. Ini mencakup berbagai tindakan yang mengelola kebijakan untuk memastikan bahwa perubahan yang dihasilkan dapat berdampak nyata pada masyarakat. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam pramono, 2020), implementasi adalah kumpulan tindakan yang berkesinambungan untuk mengubah keputusan menjadi langkah-langkah operasional yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan kebijakan. Sementara itu, Parsons (dalam Pramono, 2020) menekankan bahwa implementasi membutuhkan interaksi antara berbagai aktor, organisasi, dan prosedur birokrasi untuk menghasilkan tindakan publik yang sebenarnya.

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa, implementasi kebijakan bukanlah sekadar tindakan tunggal yang langsung, melainkan sebuah proses dinamis yang melibatkan serangkaian kegiatan dan banyak pihak, baik individu maupun organisasi, dari sektor pemerintah maupun swasta, yang bekerja sama untuk mengubah suatu keputusan kebijakan yang bersifat konseptual menjadi tindakan operasional yang nyata di lapangan.

Dalam dunia pendidikan tinggi yang memiliki banyak level birokrasi, dibatasi oleh aturan publik, dan mengikuti siklus akademik, teori ini menjadi penting. Middle theory membantu memastikan agar niat kebijakan benar-benar sampai ke mahasiswa dalam bentuk layanan yang jelas, konsisten, dan berdampak (Zulaecha & Ngiu, 2019).

Salah satu model paling berpengaruh dalam kajian ini adalah model dari Edwards III, yang memandang keberhasilan implementasi bergantung pada empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi (Dewi, 2022). Komunikasi, misalnya, mencakup seberapa jelas dan konsisten informasi yang disampaikan antarunit. Dalam praktik KIP Kuliah, kendala sering muncul saat pengumuman berubah tanpa penjelasan atau ketika tidak ada helpdesk yang aktif, yang akhirnya membuat mahasiswa salah prosedur atau harus mengulang berkas (Rohmah & Kasmawanto, 2022).

Sumber daya berkaitan dengan jumlah dan kualitas verifikator, dana operasional, serta kesiapan sistem informasi. Jika komponen ini tidak cukup, proses verifikasi akan lambat dan beban klarifikasi meningkat (Sariri & Prabawati, 2024). Disposisi atau sikap pelaksana merujuk pada bagaimana petugas layanan berinteraksi dengan mahasiswa apakah mereka cepat tanggap, empatik, dan komunikatif. Sikap ini terbukti berdampak pada kepatuhan mahasiswa dalam melengkapi dokumen dan rasa keadilan yang mereka rasakan (Masyitah, 2023). Struktur birokrasi berbicara tentang jalur alur kerja, banyaknya tahapan persetujuan, serta seberapa efektif koordinasi antarbagian berjalan. Struktur yang ramping dan selaras dengan jadwal akademik bisa mempercepat proses penetapan dan pencairan bantuan (Larasati et al., 2022).

Model Van Meter & Van Horn menawarkan pendekatan yang menekankan pentingnya standar dan tujuan kebijakan sebagai landasan evaluasi. Model ini melihat bahwa implementasi dipengaruhi oleh sumber daya, karakter organisasi pelaksana, komunikasi antarunit, kondisi lingkungan sekitar, dan sikap pelaksana (Dewi, 2022). Dalam konteks kampus, standar ini bisa diterjemahkan ke dalam ukuran seperti rasio pengajuan berkas yang benar sejak awal, durasi verifikasi–penetapan, atau tingkat retensi dan keberlanjutan studi mahasiswa (Sariri & Prabawati, 2024). Faktor lingkungan seperti padatnya jadwal akademik atau hubungan dengan mitra eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan (Roziqin & Yusuf, 2019).

Sementara itu, model Grindle membagi faktor yang memengaruhi implementasi menjadi dua kelompok utama: isi kebijakan dan konteks pelaksanaan (Martin, n.d.). Isi kebijakan meliputi kejelasan tujuan dan strategi pelaksanaannya, sementara konteks mencakup kekuatan para aktor, konfigurasi organisasi, serta dinamika politik dan administratif. Dalam program KIP Kuliah, meskipun panduan dari pusat bersifat umum, pelaksana di tiap fakultas punya pendekatan yang berbeda tergantung pada kapasitas SDM, sistem informasi, dan budaya kerjanya masing-masing (Larasati et al., 2022). Karena itulah, strategi yang efektif di satu unit belum tentu berhasil di unit lain tanpa penyesuaian (Zulaecha & Ngiu, 2019).

Jika digabungkan, ketiga model ini saling melengkapi. Edwards III unggul dalam operasionalisasi proses, Van Meter & Van Horn menyediakan kerangka evaluasi berbasis tujuan dan standar, sedangkan Grindle mengajak kita peka terhadap konteks dan relasi antaraktor (Dewi, 2022). Dalam penelitian ini, Edwards III digunakan sebagai kerangka utama, sementara dua model lainnya dijadikan pendukung khususnya untuk keperluan evaluasi dan analisis konteks lokal (Larasati et al., 2022).

Ada tiga alasan utama mengapa Edwards III dipilih. Pertama, model ini sangat aplikatif dan indikatornya bisa langsung diukur di lapangan misalnya kejelasan SOP, jumlah dan kualitas verifikator, dan efisiensi jalur persetujuan (Rohmah & Kasmawanto, 2022). Kedua, sebagian besar masalah implementasi di kampus bersifat teknis, seperti tumpukan dokumen, data tidak sinkron, atau antrean panjang saat puncak registrasi semuanya butuh solusi manajerial, bukan revisi kebijakan besar (Larasati et al., 2022). Ketiga, Edwards cocok dengan prinsip pengelolaan kampus modern yang mengandalkan manajemen mutu dan sistem informasi terintegrasi (Asy’ari, 2020).

Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip delivery management, yaitu menggunakan data operasional real-time untuk mendeteksi hambatan dan menindaklanjutinya dengan cepat lewat forum tinjauan kinerja rutin (Williams et al., 2021). Artinya, middle theory tidak hanya berfungsi sebagai teori semata, tetapi benar-benar jadi alat bantu manajemen: menentukan apa yang harus diperbaiki, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana melakukannya, dan bagaimana mengevaluasi dampaknya.

Selain itu, berbagai studi juga mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi program seperti KIP Kuliah tak lepas dari edukasi keuangan dan pendampingan kepada mahasiswa agar dana yang diterima benar-benar mendukung kelancaran studi mereka (Meiriza et al., 2023).

**2.2.3 PENERAPAN PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN (KIP KULIAH)**

Pada tingkat penerapan, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dirancang sebagai alat kebijakan untuk mengurangi hambatan biaya kuliah bagi mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Program ini tidak hanya menekankan pada perluasan akses pendidikan tinggi, tetapi juga menjunjung prinsip ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta akuntabilitas layanan publik. Sejak bertransformasi dari program Bidikmisi, KIP Kuliah menjadi bukti kehadiran negara dalam menjamin bahwa biaya tidak lagi menjadi penghalang bagi mahasiswa berprestasi untuk mengakses program studi unggulan. Dukungan yang diberikan mencakup pembiayaan pendidikan dan biaya hidup, dengan harapan bahwa kebijakan ini tidak berhenti pada penetapan penerima, tetapi berkontribusi nyata pada keberhasilan studi mereka (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Program ini memprioritaskan lulusan SMA/SMK sederajat yang baru lulus atau maksimal dua tahun sebelumnya, memiliki potensi akademik baik, dan berasal dari keluarga miskin. Verifikasi administratif dilakukan melalui kepemilikan KIP Pendidikan Menengah, partisipasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau bukti bantuan sosial lainnya. Kelompok afirmasi seperti mahasiswa asal Papua, wilayah 3T, penyandang disabilitas, dan korban bencana juga menjadi sasaran, sebagai bentuk upaya untuk menjaga keadilan dan pemerataan akses (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, 2023). Durasi bantuan disesuaikan dengan jenjang studi masing-masing mahasiswa, sehingga kampus dapat melakukan pemantauan akademik selaras dengan masa dukungan.

Untuk menjamin ketepatan sasaran dan waktu, seleksi dilakukan secara berlapis, dimulai dari pendaftaran akun calon mahasiswa melalui laman resmi KIP Kuliah, validasi otomatis oleh sistem, pemilihan jalur seleksi (SNBP/SNBT/Mandiri), hingga verifikasi akhir oleh kampus. Di sinilah kampus memainkan peran penting sebagai penjaga kualitas memastikan bahwa data identitas, bukti ekonomi, dan status penerimaan benar-benar sesuai. Untuk menghindari kekeliruan prosedur, pedoman menganjurkan adanya kanal komunikasi seperti FAQ, helpdesk, dan layanan konsultasi, yang juga berfungsi sebagai mekanisme penanganan keluhan tingkat awal (Rohmah & Kasmawanto, 2022).

Proses penyaluran bantuan mencakup dua komponen: biaya pendidikan dan biaya hidup bulanan. Jumlah bantuan disesuaikan dengan status mahasiswa (baru atau lanjutan), kebutuhan program studi, serta akreditasinya, agar mahasiswa terdorong memilih program berkualitas sekaligus menjaga efisiensi anggaran negara (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Di kampus, unit pengelola beasiswa bekerja sama dengan fakultas, program studi, dan unit keuangan untuk menyiapkan data, mencocokkan rekening penyaluran, dan melakukan rekonsiliasi rutin dengan mitra penyalur. Karena banyaknya titik persetujuan yang harus dilalui, penyederhanaan jalur koordinasi dan jalur eskalasi menjadi kunci untuk mempercepat proses, terutama saat terjadi kendala teknis seperti kesalahan rekening atau perubahan status mahasiswa (Larasati et al., 2022).

Fungsi monitoring dan evaluasi tidak boleh hanya bersifat administratif. Kampus perlu memastikan mahasiswa memahami hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi akademik dan administratif yang mungkin muncul. Untuk itu, dibutuhkan indikator proses dan hasil yang bisa ditinjau secara berkala, serta integrasi sistem aduan ke dalam mekanisme tindak lanjut yang responsif. Pendekatan delivery berbasis data real-time juga penting, agar hambatan dalam pelaksanaan bisa dideteksi sejak dini dan SOP segera diperbarui (Williams et al., 2021).

Tantangan dalam pelaksanaan KIP Kuliah sering muncul di empat titik kritis. Pertama, masalah komunikasi, terutama ketika terjadi perubahan teknis tanpa sosialisasi yang merata, mengakibatkan kesalahpahaman antarunit dan mahasiswa. Kedua, keterbatasan sumber daya, seperti rasio verifikator yang tidak seimbang dengan jumlah pemohon, terutama pada awal semester. Ketiga, sikap pelaksana, di mana kecepatan dan empati dari helpdesk sangat memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap keadilan dan kepatuhan dokumen. Dan keempat, struktur birokrasi yang terlalu bertingkat dan tidak memiliki jalur eskalasi yang jelas, menyebabkan proses menjadi lambat dan tidak efisien (Sariri & Prabawati, 2024).

Konteks kampus negeri seperti Universitas Lampung menambah tantangan tersendiri. Kampus harus mampu menyelaraskan jadwal layanan KIP Kuliah dengan kalender seleksi nasional, dan memastikan bahwa pencairan biaya hidup tiba tepat pada awal semester periode paling krusial bagi mahasiswa baru. Rekonsiliasi data antarunit (kemahasiswaan, fakultas, keuangan) juga perlu diperkuat agar tidak terjadi hambatan saat proses transisi dari penetapan ke pencairan bantuan (Roziqin & Yusuf, 2019).

Lebih jauh, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada administrasi, tetapi juga kesiapan dan perilaku penerima bantuan. Tanpa pemahaman tentang pengelolaan keuangan, dana yang diberikan bisa digunakan untuk hal yang tidak menunjang studi. Penelitian menunjukkan bahwa pendampingan dalam pengelolaan dana dan edukasi keuangan sederhana mampu membantu mahasiswa mengalokasikan bantuan secara efektif, menekan pengeluaran tidak penting, dan menjaga motivasi akademik (Kharismayanti, 2017).

Agar teori terapan ini berjalan baik di Universitas Lampung, ada tiga hal utama yang perlu diperkuat. Pertama, kejelasan peran dan alur kerja lintas unit (universitas – fakultas – prodi), termasuk standarisasi dokumen dan prosedur untuk kasus khusus. Kedua, peningkatan kapasitas sistem informasi, termasuk fitur pelacakan status dan notifikasi otomatis, serta penambahan SDM musiman untuk menghindari penumpukan kerja. Ketiga, penguatan siklus evaluasi dan umpan balik cepat yang menghubungkan proses dengan hasil nyata, seperti ketepatan sasaran, waktu pencairan, dan kepuasan mahasiswa. Dengan pendekatan ini, pelaksanaan KIP Kuliah tidak hanya mengikuti aturan, tapi juga mampu menghadirkan pengalaman layanan yang positif, informasi yang jelas, proses yang efisien, bantuan tepat waktu, dan dukungan yang nyata terhadap kelangsungan studi mahasiswa dari keluarga kurang mampu (Williams et al., 2021).

* 1. **KERANGKA BERPIKIR**

Kerangka pemikiran penelitian ini berdasarkan penelitian dan analisis teori terdahulu yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Kemiskinan menjadi penghambat bagi masyarakat dalam mempreloleh akses pendidikan, sehingga berdampak dalam kemajuan dibidang pendidikan

Melalui UU NO 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan, pemerintah diberi mandat menjamin keadilan, pemerataan, keterjangkauan akses pendidikan.

Penelitian ini dilakukan di Universitas lampung dengan melibatkan Pengurus PIP Di Univ.Lampung dan Mahasiswa sebagai objek penelitiannya

* Manfaat dana pendidikan
* Ketepatan sasaran
* Keberlangsungan studi mahasiswa

Mahasiswa menerima program dan sesuai dengan kebutuhan

Secara ideal, PIP Menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan namun kenyataannya justru keluarga mampu yang mendapatkan bantuan

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**3.1 Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menelaah kondisi objek secara alamiah sesuai dengan situasi yang sebenarnya, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Pendekatan ini lebih menekankan pada pendalaman terhadap data dan pemahaman fenomena sosial yang terjadi di lapangan, sehingga hasil dari penilitiannya berfokus dalam menganalisis makna, interaksi, dan prosesnya. Penelitian kualitatif diyakini sebagai aliran fenomenalogis, yaitu pemahaman yang di mana tidak hanya berasal dari sudut pandang peneliti saja, tetapi dari pemahaman pada gejala beserta fakta yang diamati berdasarkan sudut pandang subjek penelitian itu sendiri (Auliya dkk. 2020). Dengan menggunakan pendekatan ini memudahkan peneliti dalam menjelaskan dan memahami secara utuh mengenai situasi dan kondisi yang terjadi sebenarnnya di lapangan, Dengan menggambarkan lebih dalam bagaimana implementasi dapat berjalan dalam mencapai tujuan dari program KIP – Kuliah di Universitas Lampung.

**3.2 Fokus Penelitian**

Adapun focus dalam penelitian ini yaitu pengimplementasian kebijakan dari program KIP – Kuliah di Universitas Lampung berdasarkan model implementasi Edwards III, yang dapat peniliti jelaskan berikut ini :

1. Komunikasi, yaitu sejauh mana informasi yang berkaitan dengan kebijakan KIP Kuliah dikomunikasikan dengan jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat
2. Sumber Daya, melibatkan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan.
3. Sikap Pelaksana, yaitu berkaitan dengan komitmen dan kesediaan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Struktur Birokrasi, yaitu koordinasi antarbagian dalam struktur organisasi Universitas Lampung yang berdampak pada seberapa efektif program KIP Kuliah dijalankan.

**3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi yaitu di Universitas Lampung. Pemilihan lokasi pada penelitian ini didasarkan oleh beberapa alasan karena sebagai salah satu universitas tertua di Lampung yang menjadi bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat pendidikan tinggi negeri. Selain itu, dengan kehadiran peneliti secara langsung di kampus sangat penting agar dapat mengumpulkan data dengan lebih rinci mengenai proses dan dampak program tersebut bagi mahasiswa penerima beasiswa.

**3.4 Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder dan data primer , yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian berupa data lapangan melalui pengamatan atau percakapan. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi guna menggali lebih dalam terkait informasi dan situasi nyata mengenai pengimplementasian dari program KIP Kuliah di Universitas Lampung.

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendekatan metodelogis yang informasinya didasarkan pada pemanfaatan data yang sudah ada atau materi yang telah dipublikasikan sebelumnya sebagai sarana utama dalam pengumpulan suatu informasi (Sugiyono, 2022). Dengan kata lain, data sekunder yang diperoleh oleh peniliti melalui beberapa penelitian kepustakaaan, yang mencakup kegiatan mengumpulkan, membaca, dan memahami teori teori yang telah disajikan dalam artikel, buku, jurnal, atau data yang dapat diperoleh dan diakses melalui berbagai sumber, baik secara *online* maupun *offline,* yang berkaitan dengan penilitan yang sedang berlangsung. Hal ini meliputi, Panduan Teknis KIP-Kuliah, laporan pelaksanaan program di Universitas Lampung, serta studi literatur dari jurnal-jurnal ilmiah. Dengan demikian, data tersebut dapat menjadi informasi pendukung yang memperkuat argumen dan analisis bagi peneliti.

**3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid, penelitian ini menggunakan tiga metode pengemupulan data utama, yaitu:

1. Obeservasi

Observasi adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan memperhatikan perilaku dan kegiatan dalam situasi tertentu secara langsung (sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, Pengamatan dilakukan secara langsung pada lingkungan Universitas Lampung, khususnya pada bagian yang mengelola Program KIP-Kuliah. Melalui teknik ini, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana proses pelaksanaan KIP-Kuliah berjalan, seperti cara pendaftaran, kegiatan sosialisasi, serta interaksi antara pengelola program dan mahasiswa. Tujuan observasi ini adalah untuk mendapatkan data nyata tentang pelaksanaan kebijakan di lapangan dan memastikan apakah pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

1. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data berupa interaksi tanya jawab langsung antara peneliti dan responden ( Sugiyono, 2022). Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka, Di mana peneliti menyampaikan maksud wawancara kepada responden. Kemudian responden akan menjawab pertanyaan pertanyaan yang memiliki hubungan erat dengan masalah penelitian. Tujuannya ialah mencari data yang sesuai dengan masalah penelitian dari sumber primer yang diwawancarai.

Tabel 2. Narasumber dalam Penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama |  Jabatan dan instansi | Informasi yang dicari |
| 1. | Furqanandi Ari Sasono, S. E. | Staf pelaksana bidang akademik BAK UNILA | 1. sejauh mana informasi dikomunikasikan dengan jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat
2. melibatkan kesesuaian ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan.
3. kesediaan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. koordinasi dalam struktur organisasi Universitas Lampung yang berdampak pada seberapa efektif program KIP Kuliah dijalankan
 |
| 2.  | Tegar Dheo Alvitto | Ketua Umum Forkom Bidikmisi/KIP-K Unila tahun 2025 |
| 3. | Tiara Istiqory Marvi | Penerima KIP-K Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 2024 |
| 4. | Winna Pandan Sari | Penerima KIP-K FISIP 2024 |
| 5. | Aliya Yara | Penerima KIP-K Fakultas Hukum (FH) 2023 |

1. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan dan analisis dokumen yang terdiri dari tulisan, gambar, dan media digital. Dokumen yang dikumpulkan dipilih sesuai dengan focus penelitian, yang kemudian diuraikan, dibandingkan, hingga membentuk hasil kajian yang terstruktur dan menyeluruh.

1. Studi literatur

Studi Pustaka adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan menelaah sumber sumber pustaka dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, atau media sehingga dapat menghasilkam sumber yang relevan terkait dengan keefektifan program tersebut.

**3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi salah satu tahapan penting dalam penelitian. Pada tahap ini, Peniliti menggunakan metode analisis data berbasis interaksi yang telah dikenalkan oleh Huberman dan Miles (1984; dalam Qomaruddin & Sa'diyah, 2024), Metode ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyaringan dan penggabungan informasi yang dianggap penting, dengan cara menghilangkan data yang tidak sesuai. Proses ini meliputi penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan. Memilih data tertentu bukanlah satu-satunya bagian dari proses analisis yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, dan mengorganisasi data agar lebih terarah. Tujuan akhirnya adalah menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang bermakna, teratur, dan mudah dipahami.

1. Penyajian Data

Proses ini membantu peneliti menampilkan hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti cerita deskriptif. Selain itu, peneliti dapat memanfaatkan alat bantu visual seperti tabel, matriks, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan antarfenomena yang diteliti saat menyampaikan data melalui penjelasan tertulis.

1. Penarikan Kesimpulan

Tahap Selanjutnya, peneliti dapat menafsirkan data dan merumuskan temuan awal. Kesimpulan yang dibuat pada awalnya masih bersifat sementara dan dapat diperbaiki jika ditemukan data baru. Oleh karena itu, Proses verifikasi dilakukan secara berlanjut guna memastikan keabsahan dan ketepatan kesimpulan yang diperoleh benar-benar kuat, terpercaya, dan didukung oleh bukti yang jelas. Setelah data dianggap cukup dan tidak ada lagi temuan yang berbeda, selanjutnya baru dapat disusun kesimpulan akhir.

**3.7 Teknik Validitas Data**

Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memastikan keabsahan data dan kredibilitas pada penelitian kualitatif ini. Triangulasi adalah metode yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan ketepatan hasil penelitian dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data dari berbagai pandangan. Pendekatan ini membantu peneliti meminimalkan kemungkinan munculnya bias selama proses pengumpulan data (Arianto, 2024).Pada pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan dua bentuk triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan serta memeriksa kembali keakuratan informasi yang didapat dari beragam informan untuk memastikan keabsahan data, seperti mahasiswa penerima program dan pengelola program, untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Sebaliknya, triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa data dari satu sumber menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, analisis dokumen, dan wawancara.

Tujuan penggunaan triangulasi untuk membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai isu yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, data yang dihasilkan menjadi lebih kuat, akurat, dan mencerminkan realitas lapangan secara lebih objektif. Oleh karena itu, diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya tentang implementasi program yang menjadi fokus kajian.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Arianto, B. (2024). Triangulasi metoda penelitian kualitatif.

Asy’ari, H. (2020). Manajemen mutu pendidikan tinggi.

Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. CV Pustaka Ilmu.

Dewi, D. S. K. (2022). Kebijakan publik: Proses, implementasi, dan evaluasi. Penerbit Samudra Biru.

Implementasi kebijakan publik: Aktor, peran, dan jaringan. (2024). Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Buku saku KIP Kuliah Merdeka. Kemdikbud.

Manajemen daya saing perguruan tinggi. (2020). CV Cendekia Press Konsultan.

Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Dalam Kebijakan publik.

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. (2023). Pedoman pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2023 (Versi 3.0). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian: Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2008). Analisis kebijakan pendidikan: Suatu pengantar. Pustaka Pelajar.

Williams, M. J., Leaver, C., Mundy, K., Mansoor, Z., Qarout, D., Asim, M., & Bilous, A. (2020). Delivery approaches to improving policy implementation: A conceptual framework. Education Commission, University of Oxford, UKAid.

Zulaecha, E., & Ngiu, A. (2019). Manajemen perguruan tinggi. Ideas Publishing.

**Jurnal**

Amroni, M. Al., Alhadihaq, M. Y., & Sumiati, N. (2023). Efektivitas bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap motivasi peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung. Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 12(2), 158. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1521>

Dewi, D. S. K. (2019). Buku ajar kebijakan publik. UM Jakarta Press.

Harismayanti, S. I. (2017). Pola penggunaan dana dan gaya hidup mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, 6(4), 401–408.

Larasati, A. D., dkk. (2022). Analisis kebijakan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar–Kuliah (KIP-K) di Universitas Diponegoro. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 5(1), 1–22.

Lomban, B., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2023). Implementasi program Kartu Indonesia Pintar di SD Negeri Inpres Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa. Jurnal Eksekutif, 3(3), 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/49734>

Masyitah, S. (2023). Efektivitas penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Meiriza, M. S., Sembiring, G. B., Wardana, V., Sitorus, M., & Sakinah, N. (2023). Analisis beasiswa KIP Kuliah dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan tahun 2023. Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, 18(1), 905–913.

Nadia, N., Kurnianingsih, F., & Setiawan, R. (2024). Implementasi program Indonesia Pintar (PIP) tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Tanjungpinang tahun 2023. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 1(3), 181–194. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.521>

Nurfauziah, N. M., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Kabupaten Purwakarta. Journal of Public Policy and Management Review, 9(2), 15–34.

Qomaruddin, Q., & Sa’diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles, dan Huberman. Journal of Management, Accounting, and Administration, 1(2), 77–84.Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan. Journal of Education Management and Administration Review, 2(1), 193–204.

Rohmah, E. N. L., & Kasmawanto, Z. (2022). Implementasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di perguruan tinggi swasta. Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, 14(1), 85–104. <https://doi.org/10.52166/madani.v14i1.2886>

Roziqin, A., & Yusuf, I. M. (2019). Implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi: Studi kasus di Universitas Diponegoro. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 8(2), 110–122.

Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya. Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 12(1), 238–251.

Seniati. (2021). Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Sucita, R. (2021). Implementasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) di Universitas Riau. Journal Publicuho, 4(4), 1112–1120. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i4.2183>

**DASAR HUKUM**

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

**ARTIKEL**

Badan Pusat Statistik. (2025, 25 Juli). Tingkat kemiskinan kembali menurun. Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal [8 September 2025], dari [https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html](https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html?utm_source=chatgpt.com)